

---

## ANALISIS KESEHATAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA SE PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016-2019

**Achmad Taufik<sup>1</sup>, Eko Sugiyanto<sup>2</sup>, Kumba Digdowiseiso<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Nasional

Email : opikcumin@gmail.com, ekoantodr@gmail.com,

kumba.digdo@civitas.unas.ac.id,

### *Abstract*

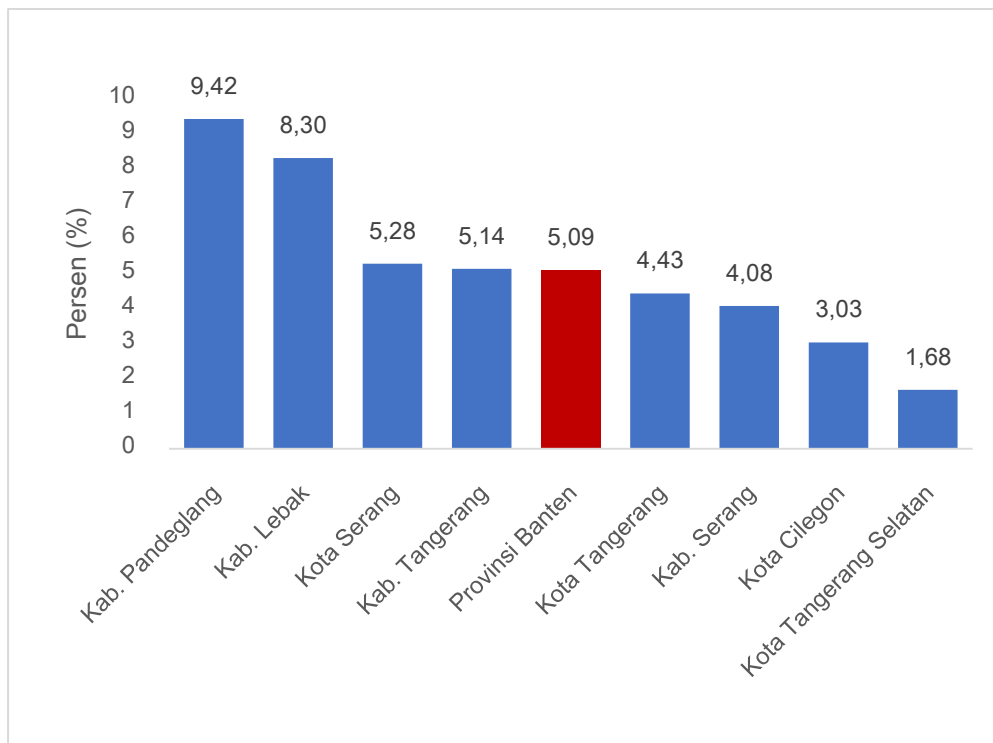
*The regional financial condition is an important instrument to assess the extent of the condition of regional financial capacity and performance. In this research, he wants to know the condition of the regional financial health in the regencies / cities in Banten Province, in the period 2016-2019. The research method used is quantitative with the results of calculations described descriptively, the data used is a summary of the realization of the TA budget. 2016-2019, and regional statistical data in numbers, such as total population and gross regional income (PDRB) of each Regency / City in Banten Province. The results of the analysis and findings show that the highest index score in the 2016-2019 period ranged from 0.724 to 0.791, while the lowest index score was between 0.124-0.159. There are 5 regions that show an increase in the index, while 3 other regions have a decrease. In terms of index scores, the regions that experienced an increase in the regional financial health index were Serang Regency (0.162), Lebak Regency (0.138), Serang City (0.084), South Tangerang City (0.023) and Cilegon City (0.003). Meanwhile, the regions whose scores decreased were Tangerang City (-0.009), Pandeglang Regency (-0.035) and Tangerang Regency (-0.061). In terms of ranking, the highest score index is South Tangerang City and Tangerang Regency. In 2016 the highest score was South Tangerang City (0.724), in 2017-2018 there was a change in ranking, the highest was Tangerang Regency (2017: 0.791) and (2018: 0.742), in 2019 the highest ranking was South Tangerang City (0.747). The districts / cities that did not experience a change in the regional financial health index score rankings were Tangerang City (rank 3), Cilegon City (rank 4) and Serang Regency (rank 5). Meanwhile, the districts with the lowest average index were Lebak (0.244) and Pandeglang (0.147). Meanwhile, based on the type of city government, only Serang City whose score is still below the average index. Meanwhile, in the district government type, Tangerang Regency is the representative of the Regency which has a high index score. Even though Serang City is below average, but in terms of consistent scores, Serang city*

*continues to increase and experience improvement. The regional financial health ranking index score is only compared between districts / cities in Banten Province for the 2016-2019 fiscal year. The development gap and regional fiscal ratio in Banten Province are very visible. The next research, especially to examine the financial performance of the City, can compare with other cities that are considered more equal.*

**Keywords:** *Financial Health Condition; Local Budget Index; Budget Ratio.*

## PENDAHULUAN

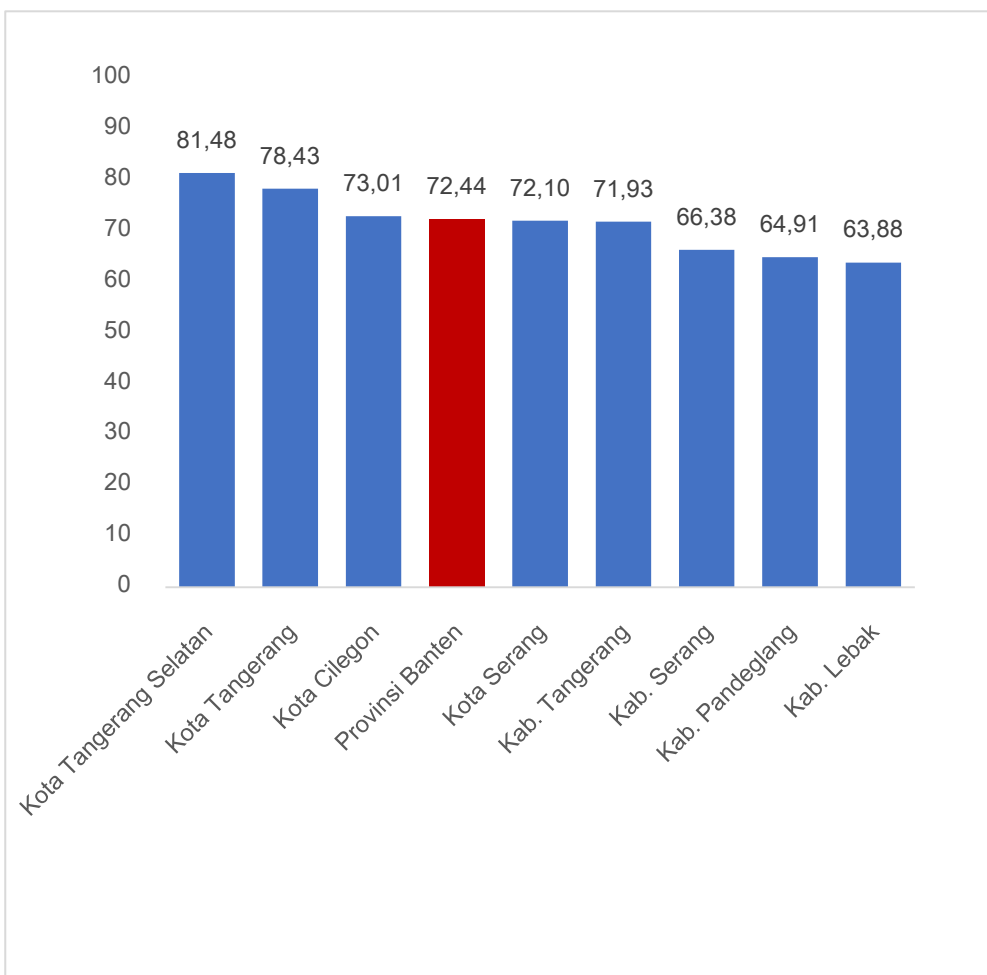
Dalam model paradigma pembangunan, orientasi pembangunan memiliki basis orientasi yakni *economic growth, basic need* dan *people centered*. Sedangkan parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan (Nurcholis, 2016), adalah pertumbuhan ekonomi, PDB/PDRB Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Pengangguran dan indikator pembangunan keberlanjutan.



**Grafik 1.**

Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Banten, 2019 (Sumber: BPS Provinsi Banten, 2020).

Secara umum, Provinsi Banten telah cukup berhasil dalam penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan telah menurun 1,93% selama kurun waktu 10 tahun terakhir, dari 7,02% pada tahun 2010 menjadi 5,09% pada 2019. Namun, jika dilihat distribusi angka kemiskinan menurut Kabupaten/Kota masih terlihat kesenjangannya. Empat daerah berada di bawah rata-rata, sementara empat daerah lainnya berada di atas rata-rata angka kemiskinan Provinsi Banten. Hal tersebut terlihat dari grafik persentase penduduk pada 2019. Selain itu, persentase penduduk miskin di Kabupaten Lebak dan Pandeglang terlihat disparitas yang cukup jauh dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya.



**Grafik 2.**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Banten, 2019. (Sumber : BPS Provinsi Banten, 2020).

Selain itu, capaian pembangunan lainnya dapat terlihat dari peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Banten. Berdasarkan data BPS Banten, bahwa IPM Banten menunjukkan peningkatan, mulai dari 2010 dengan skor 67,54 meningkat menjadi 72,44 pada tahun 2019. Sedangkan berdasarkan data IPM berdasarkan Kabupaten/Kota pada 2019, masih menunjukkan ketimpangan antara Pemerintahan Kota dengan Pemerintahan Kabupaten. Kabupaten Serang, Lebak, dan Pandeglang terlihat terjadi ketimpangan dengan daerah lainnya. Ketimpangan tersebut terlihat dari nilai IPM dari grafik di atas.

Dari data persentase penduduk miskin dan indek pembangunan manusia di Provinsi Banten menunjukkan masih terjadi kesenjangan pembangunan. Meskipun terjadi peningkatan IPM dan menurunnya angka kemiskinan, tetapi sebaran berdasarkan Kabupaten/Kota masih terjadi kesenjangan distribusi pembangunan.

Kesenjangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan anggaran pada masing-masing daerah tersebut. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan dan anggaran dalam rangka untuk memberikan pelayanan dalam bentuk pembangunan dan mengurangi ketimpangan pembangunan. Salah satu instrumen pembiayaan pembangunan melalui pemerintah daerah dialokasikan setiap tahunnya dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran untuk pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang Sah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga dapat diartikan sebagai rencana operasional keuangan daerah yang menggambarkan penerimaan pendapatan daerah dan pengeluaran untuk pembiayaan rutin serta pengeluaran pembangunan dalam satu periode anggaran (Adisasmita, 2014). APBD adalah bentuk pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang sudah disetujui oleh DPRD.

Pada era otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan (diskresi) bagi penyelenggara pemerintahan daerah untuk membangun daerah. Bagaimana mengoptimalkan APBD seefektif mungkin dan menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran daerah. Pemerintah daerah harus mampu merumuskan kebijakan keuangan yang inovatif, kreatif, efektif dan efisiensi, agar hasil pembangunan dapat optimal.

Dalam pengelolaan fiskal terdapat indikator-indikator penilaian bagaimana mengelola keuangan daerah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 266/PMK.07/2015 tentang Peningkatan Kesehatan

Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 8 ayat (2) sebutkan terdapat 11 indikator kinerja kesehatan fiskal dan keuangan daerah. Berikut adalah 11 indikator yang dimaksud dalam aturan tersebut.

- a. realisasi pendapatan asli daerah/ realisasi total pendapatan daerah;
- b. growth (realisasi pajak daerah dan retribusi daerah/ realisasi total pendapatan daerah);
- c. realisasi ruang fiskal/ realisasi total pendapatan APBD;
- d. realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah/ realisasi produk domestik regional bruto non-minyak bumi dan gas bumi;
- e. realisasi total pendapatan daerah + realisasi penerimaan pembiayaan/ realisasi total belanja daerah + realisasi total pengeluaran pembiayaan;
- f. realisasi belanja modal/ realisasi total belanja APBD;
- g. realisasi belanja pegawai/ realisasi total belanja APBD;
- h. realisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya/realisasi total belanja APBD;
- i. defisit APBD/ total pendapatan APBD;
- j. realisasi pendapatan APBD /target pendapatan APBD; dan
- k. realisasi belanja APBD/pagu belanja APBD.

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan suatu daerah untuk mengetahui tingkat target capaian keuangan daerah tersebut. Untuk itu pengukuran kinerja keuangan daerah harus dilakukan secara ekonomis efisien dan efektif atau memenuhi *value for money* serta transparansi, akuntabilitas, keadilan dan partisipasi masyarakat agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bisa mengurangi jumlah penganggaran serta menurunkan tingkat kemiskinan di daerah.

Salah satu alat menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Menurut Widodo (Halim, 2002) hasil analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk: (a) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. (b) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah. (c) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya. (d) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah. (e) Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

Menurut Mardiasmo pada dasarnya terdapat 2 hal yang dapat dijadikan sebagai indikator kinerja, yaitu kinerja anggaran dan anggaran

kinerja. Kinerja Anggaran merupakan instrumen yang dipakai oleh DPRD untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah, sedangkan Anggaran Kinerja merupakan instrumen yang dipakai oleh kepala daerah untuk mengevaluasi unit-unit kerja yang ada di bawah kendali daerah selaku manager eksekutif. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu program kerja telah dilaksanakan secara efisien dan efektif. (Mardiasmo, 2002).

Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan sebuah sistem penganggaran yang berfokus pada hasil yang akan dicapai. Bastian menyebutkan bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan erat dengan visi dan misi serta perencanaan strategis organisasi. (Bastian, 2006) Selanjutnya menurut Mardiasmo anggaran kinerja merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik yang berarti berorientasi pada kepentingan publik. Menurut OECD, *performance-based budgeting is a form of budgeting that relates fund allocated to measurable results*. Artinya, penganggaran berbasis kinerja adalah suatu metode penganggaran publik yang menghubungkan antara alokasi anggaran dengan hasil-hasil yang akan dicapai.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kinerja keuangan daerah berdasarkan kinerja anggaran dengan judul analisis kondisi keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten. Kajian ini difokuskan pada indikator kesehatan keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada realisasi anggaran periode 2016-2019.

### **Tinjauan Pustaka**

Menurut Masdiantini dan Erawati bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio kemandirian, ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. (Masdiantini dan Erawati, 2016) Kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah yang diperolehnya. Ekonomi menunjukkan tingkat kehematan pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah. Efektivitas menunjukkan realisasi pendapatan yang dapat dicapai oleh pemerintah daerah. Efisiensi menunjukkan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai realisasi pendapatan.

Sejalan dengan itu, dalam pendekatan normatif menekankan bawah implementasi kebijakan sektor publik mempunyai derajat kesulitan lebih tinggi, karena erat kaitannya dengan aspek politik dan harus mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan. (Digdowiseiso, 2015)

Sedangkan menurut Sularso dan Restianto menyebutkan kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. (Sularso dan Restianto, 2011).

Mardiasmo mengatakan kinerja keuangan adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. Pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi financial seperti laporan keuangan, diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat.

Kenneth W. Brown, memperkenalkan template perhitungan kesehatan keuangan daerah dianggap mudah (Brown, 1993). Dengan menghitung rasio dari 10 indikator, yang dikenal dengan istilah *The Ten-Point Test of Fiscal Condition*. Berikut 10 indikator rasio untuk mengukur kondisi fiskal yang dimaksud oleh Brown, yaitu:

1. Rasio total pendapatan terhadap populasi (Pendapatan per Kapita)
2. Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah
3. Rasio pendapatan daerah dari pendapatan lainnya terhadap total pendapatan daerah
4. Rasio belanja operasi terhadap total belanja daerah.
5. Rasio total pendapatan daerah terhadap total belanja daerah.
6. Rasio saldo dana umum yang tidak dicadangkan terhadap total pendapatan daerah
7. Rasio total kas dana umum dan investasi terhadap total kewajiban dana umum
8. Rasio total kewajiban dana umum terhadap total pendapatan daerah
9. Rasio hutang jangka panjang langsung terhadap populasi
10. Rasio rasio hutang terhadap total pendapatan daerah

Brown melakukan penelitian mengenai *The 10-Point Test of Financial Condition: Toward an Easy-to-Use Assessment Tool for Smaller Cities*. Brown mengembangkan model perhitungan alat uji sederhana untuk melihat kondisi kesehatan keuangan suatu daerah. Dalam hasil penelitian tersebut Brown merumuskan perhitungan sederhana untuk menilai kondisi fiskal dengan cara menghitung rasio pada tahun penilaian (rasio statis), membuat kuartil atas rasio dari klasifikasi daerah berdasarkan populasi, memberikan nilai pada masing-masing kuartil dan menjumlahkan nilai total

dari masing-masing rasio. Variabel yang dinilai mencakup 4 sektor yaitu: pendapatan, pengeluaran, posisi operasional dan struktur hutang. Penilaian dilakukan pada daerah/kota yang dianggap sama berdasarkan jumlah penduduk, untuk itu Brown mengelompokkan daerah/kota menjadi 4, yaitu: kurang dari 15.000, 15.000-30.000, 30.000-50.000 dan 50.000-100.000.

Natrini dan Ritonga (2017) melakukan penelitian dengan judul *Design and Analysis of Financial Condition Local Government Java and Bali (2013-2014)*. Dalam penelitiannya, Natrini dan Ritonga mengukur kondisi keuangan dengan metode Brown (1993) yaitu mengukur rasio fiskal pada tahun penilaian (rasio statis), membuat kuartil dan memberi nilai pada kuartil, dengan penyesuaian variabel penilaian terhadap kondisi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif untuk penyesuaian variabel. Penelitian ini juga menggunakan pembagian klaster daerah berdasarkan kondisi sosio-ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di antara 7 klaster yang dianalisis, ada variasi dari hasil, meskipun masing-masing klaster memiliki kondisi sosial ekonomi yang mirip satu sama lain. Variasi ini pada kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia disebabkan oleh daerah otonom.

Digdowiseiso dan Djumadin (2020) menguji desentralisasi fiskal di Kabupaten Karawang dengan indikator derajat desentralisasi fiskal, salah satunya dapat dilihat dari rasio tingkat efektivitas pendapatan daerah (perbandingan PAD dengan Pendapatan Daerah), dan analisis kemandirian keuangan daerah yang digunakan untuk mengetahui arah pengembangan kemandirian keuangan daerah. Studi tersebut menunjukkan bahwa secara umum dalam sepuluh tahun terakhir, tren derajat desentralisasi di Karawang mengalami perkembangan yang baik. Berdasarkan analisis tahun anggaran 2009-2018, bahwa tingkat kemandirian finansial di Kabupaten Karawang berada pada kriteria konsultatif yang menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat mulai berkurang. Namun, Kabupaten Karawang belum optimal dalam menjalankan desentralisasi fiskal karena belum adanya kewenangan penuh dari pemerintah daerah dalam mengelola pendapatannya. Kendati demikian, Karawang mampu mengelola pendapatannya secara efektif. Namun efektivitas pengelolaan pendapatan belum mampu mendorong Karawang menjadi lebih mandiri.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode campuran antara data analisis kuantitatif yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif dari hasil analisis datanya. Data yang akan digunakan adalah data anggaran daerah yang berupa ringkasan realisasi anggaran periode tahun anggaran 2016-2019. Selain data anggaran, digunakan juga data statistik dari BPS Banten, seperti jumlah



penduduk dan pendapatan daerah regional bruto (PDRB), yang didapatkan dalam publikasi daerah dalam angka Provinsi Banten, periode 2017-2020 yang diakses secara online.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari (tracking) data anggaran yang dikompilasi dan dipublikasi dalam laman website [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) dan [www.bps.banten.go.id](http://www.bps.banten.go.id), yang dapat diakses secara terbuka melalui online website. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kesehatan keuangan daerah yang diadopsi melalui Kenneth Brown (1993) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

Dalam melakukan analisis indikator kesehatan keuangan daerah tersebut mengadopsi pada teori Ten Point Test (Brown, 1993) untuk mengetahui tingkat kondisi kesehatan keuangan masing-masing daerah yang disesuaikan dengan indikator dan struktur data yang tersedia. Sebagaimana pernah dilakukan analisa oleh Kementerian Keuangan dalam publikasi "Analisis Realisasi APBD Tahun Anggaran 2012 (DJPK, 2013). Analisis rasio yang dilakukan oleh Brown digunakan untuk mengukur kondisi fiskal daerah antar pemerintah daerah dengan berdasarkan beberapa rasio sederhana, yang setiap rasionya terfokus pada empat aspek kesehatan fiskal yaitu pendapatan, pengeluaran, posisi operasi dan struktur utang. Sementara metode peng-skor-an dilakukan penyesuaian dengan metode indeks supaya terlihat gradasi nilai antar Kabupaten/Kota, tidak dikelompokkan dalam 4 kelas/kelompok (skala likert) sebagaimana dilakukan oleh Brown.

Untuk mengetahui analisis kesehatan keuangan daerah di Indonesia dilakukan modifikasi terhadap metode ten-poin-test tersebut. Penyesuaian atau modifikasi tersebut dilakukan karena adanya perbedaan jenis dan standarisasi data dan informasi keuangan daerah yang ada di Indonesia dengan tempat dilakukannya penelitian Brown, yaitu di Amerika Serikat. Berdasarkan telaah dan diskusi yang telah dilakukan dan memperhatikan pula ketersediaan data, maka dihasilkan 9 (sembilan) indikator keuangan yang dapat digunakan dalam mengukur kesehatan keuangan daerah.

1. **Indikator pendapatan daerah per kapita;** Rasio ini pada dasarnya menunjukkan ukuran riil dari besarnya pendapatan daerah karena dibagi dengan jumlah penduduk yang harus dilayani oleh pemerintah daerah. Semakin besar jumlah penduduk maka akan semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah daerah, sehingga kedepannya perlu ditingkatkan effort yang lebih kuat dalam meningkatkan seluruh pendapatan daerahnya.
2. **Indikator kemandirian keuangan daerah;** indikator ini diukur dengan menggunakan rasio Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan total

pendapatan daerah. Dengan mengetahui kemandirian keuangan daerah ini menunjukkan seberapa besar *local taxing power* suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Rasio akan menunjukkan tingkat kesehatan semakin baik bila terus meningkat, akan tetapi perlu diperhatikan pula bila terjadi kenaikan secara kontinyu atas pendapatan bunga, karena hal tersebut bisa diartikan terdapat peningkatan dana pemda yang disimpan dalam bank dan tidak dibelanjakan.

3. **Indikator Rasio Ruang Fiskal Daerah;** Indikator ini pada dasarnya menunjukkan seberapa besar ruang fiskal atau keleluasaan yang dimiliki daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja yang akan didanai. Semakin besar rasionya, berarti ruang fiskal atau keleluasaan yang dimiliki daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja yang didanai juga semakin besar.
4. **Indikator Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;** Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah secara tidak langsung bisa tercermin dari kemampuan daerah dalam mengkonversi seluruh potensi penerimaan pajak daerah menjadi pajak daerah yang bisa dipungut. Potensi penerimaan pajak daerah bisa tercermin dari besarnya Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dari masing-masing daerah. Semakin besar rasio Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB maka kemampuan daerah tersebut dalam mengkonversi seluruh potensi penerimaan pajak daerah menjadi pajak daerah yang bisa dipungut juga semakin besar.
5. **Indikator Kemampuan Mendanai Belanja Daerah;** Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula.
6. **Indikator Belanja Modal;** Salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah dengan semakin besarnya porsi belanja modal sebagai bagian dari total belanja daerah. Belanja modal yang besar diharapkan akan

memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan potensi-potensi penerimaan daerah yang baru. Semakin besarnya rasio belanja modal terhadap keseluruhan belanja, maka kemampuan keuangan daerah untuk mengalokasikan porsi belanjanya pada belanja modal semakin besar.

7. **Indikator Belanja Pegawai Tidak Langsung + Langsung;** Semakin membaiknya kualitas belanja daerah bisa juga dilihat dari semakin menurunnya porsi belanja pegawai tidak langsung + belanja langsung dalam APBD. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sedikit porsi APBD yang digunakan untuk belanja aparatur, sehingga APBD bisa lebih terkonsentrasi pada belanja yang langsung terkait dengan layanan publik. Asumsinya belanja ini semakin berkurang maka akan direalokasikan ke belanja modal dan belanja barang dan jasa yang lebih efektif dalam mendorong roda perekonomian daerah.
8. **Indikator optimalisasi SiLPA;** Besarnya SiLPA pada akhir tahun tentunya menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Jika SiLPA tersebut mampu dimanfaatkan untuk belanja pada tahun berkenaan, maka memberikan indikasi bahwa daerah mampu mengoptimalkan penggunaan SiLPA. Semakin besar rasio optimalisasi SiLPA, maka kemampuan daerah untuk mengoptimalkan SiLPA juga semakin besar.
9. **Indikator kemampuan pembayaran pokok hutang dan bunga daerah;** indikator ini menunjukkan seberapa besar porsi pendapatan daerah yang digunakan untuk membayar pokok pinjaman beserta bunganya dalam satu periode waktu tertentu. Semakin besar rasio pembayaran pokok hutang dan bunga daerah terhadap pendapatan, maka daerah semakin mampu untuk menjamin pengembalian hutang-hutangnya melalui pendapatan yang diterimanya.  
Secara ringkas seluruh indikator kesehatan keuangan daerah beserta definisi dan jenis datanya bisa digambarkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.**  
Indikator-indikator Kesehatan Keuangan Daerah

No	Rasio	Definisi	Jenis Data	Sumber Data
1	Total Pendapatan Daerah/	Tingkat kemampuan daerah dalam melayani per satu orang	Pendapatan Daerah, Jumlah Penduduk	APBD, BPS

	Jumlah Penduduk	penduduknya		
2	PAD/Total Pendapatan Daerah	Tingkat kemandirian daerah, yaitu kemampuan daerah dalam mendanai belanjanya	PAD, Pendapatan Daerah	APBD
3	Ruang Fiskal /Total Pendapatan Daerah	Tingkat kemampuan daerah dalam mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerahnya	Pendapatan Daerah, DAK, Hibah, Dana Penyesuaian, Dana Darurat, Belanja Pegawai Tidak Langsung, Belanja Bunga	APBD
4	Pajak dan Retribusi Daerah/ PRDB	Tingkat kemampuan daerah dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerahnya menjadi penerimaan pajak daerah	Pajak dan Retribusi Daerah, PDRB Non Migas	APBD, BPS
5	Total Pendapatan Daerah+ Penerimaan Pembiayaan/ Total Belanja Daerah+ Pengeluaran Pembiayaan	Tingkat kemampuan keuangan daerah dalam mendanai belanja dan pengeluaran daerah	Total Pendapatan Daerah, Total Penerimaan Pembiayaan, Total Belanja Daerah, Total Pengeluaran Pembiayaan	APBD
6	Belanja Modal / Total Belanja Daerah	Seberapa besar daerah mengalokasikan seluruh belanjanya untuk belanja modal	Belanja Modal, Total Belanja Daerah	APBD
7	Belanja Pegawai Tidak Langsung+ Belanja Langsung/ Total Belanja daerah	Seberapa besar daerah mengalokasikan seluruh belanjanya untuk belanja pegawai tidak langsung	Belanja Pegawai Tidak Langsung, Belanja Pegawai Tidak Langsung, Total Belanja Daerah	APBD
8	SiLPA tahun sebelumnya/ Belanja daerah	Proporsi SiLPA TA sebelumnya terhadap belanja daerah berjalan	SiLPA, Total Belanja Daerah	APBD
9	Pembayaran	Proporsi pembayaran	Pembayaran	APBD

	pokok utang + bunga / total pendapatan daerah	pokok dan bunga utang yang harus dibayar dari pendapatan daerah dalam 1 periode	pokok pinjaman, belanja bunga, total pendapatan daerah	
--	---	---	--	--

Cara penghitungan sembilan rasio analisis ini dengan mengacu pada cara penghitungan *tenpoint test analysis*-nya Brown, yang dimodifikasi dengan metode indeks adalah sebagai berikut:

1. Menghitung rasio dari masing-masing indikator berdasarkan data yang sudah dikompilasi,
2. Kemudian dari hasil perhitungan rasio tersebut kemudian buat rumus indeks yang disesuaikan dengan angka tertinggi skor indeks = 1, dan angka terendah dengan skor indeks = 0,1.
3. Dalam menghitung indeks, disesuaikan dengan urutan penilaian rasio yang diinginkan dari masing-masing rasio. Misalnya, rasio pendapatan per kapita, maka skor yang lebih diinginkan adalah rasio yang tinggi adalah semakin bagus. Sebaliknya, untuk rasio yang menurut *common sense* dianggap rasio yang semakin rendah semakin bagus, misalnya rasio belanja pegawai tidak langsung / total belanja daerah, maka pengurutannya dibalik dengan rumus indeks *reverse adjustment*.

Secara umum, hasil perhitungan indeks akan menghasilkan nilai minimum 0, dan maksimum 1. Dalam perhitungan indeks pada kajian ini disesuaikan untuk menghasilkan nilai (tepi) bawah bernilai 0,1 dan nilai (tepi) atas tetap bernilai 1. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan nilai terendah dari indikator rasio yang tetap bernilai tidak diberikan skor indeks 0, tetapi tetap dihargai 0,1. Berikut adalah formula perhitungan indeks skor yang disesuaikan. Sebagai contoh untuk menghitung indeks dari rasio pendapatan per kapita.

$$IRPP\ Kab\ i = 0,1 + 0,9 \times \frac{(RPP_{Kab\ i} - RPP_{Kab\ min})}{(RPP_{Kab\ max} - RPP_{Kab\ min})}$$

Dimana:

$IRPP\ Kab\ i$  = Indeks Rasio Pendapatan Daerah per Kapita Kabupaten

$RPP\ Kab\ i$  = nilai Rasio Pendapatan Daerah per Kapita Kabupaten/Kota

$RPP\ Kab\ min$  = nilai Rasio Pendapatan Daerah per Kapita terendah dari seluruh Kabupaten/Kota

$RPP\ Kab\ max$  = nilai Rasio Pendapatan Daerah per Kapita tertinggi dari seluruh Kabupaten/Kota

4. Dari angka indeks tersebut, kemudian dihitung secara rata-rata dari 9 indikator tersebut. Kemudian angka rata-rata tersebut dijadikan nilai akhir dengan pemeringkatan, semakin tinggi nilai rata-rata tersebut maka menunjukkan kesehatan fiskal daerah semakin baik, sebaliknya jika semakin rendah maka kesehatan keuangan daerahnya semakin kurang baik. Rata-rata skor indeks dikategorisasikan pada rentang kelas berikut

**Tabel 2.**  
 Kategori Skor Indeks

No	Rentang Skor/Indeks	Kategori
1	0,800 – 1,000	Sangat Tinggi
2	0,600 – 0,800	Tinggi
3	0,400 – 0,600	Sedang
4	0,200 – 0,400	Rendah
5	0,100 – 0,200	Sangat Rendah

Perhitungan rasio dan indeks ini, hanya diperbandingkan antar daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten, pada Tahun Anggaran (TA) periode 2016-2020.

Catatan: Dalam perhitungan indikator 9 tentang rasio pokok dan bunga utang terhadap pendapatan daerah pada TA. 2018, didapatkan nilai 0% pada semua daerah. Untuk itu, perhitungan indeksnya dikecualikan hanya pada indikator ini, kemudian untuk nilai indeksnya, karena tepi bawahnya bernilai skor 0,1, maka semua daerah diberikan skor sama, yaitu 0,10 skor indeks.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis dari skor indeks kondisi keuangan daerah berdasarkan kategori skor indeks dihasilkan sebagai berikut:

**Tabel 3.**  
 Hasil Kategori Kondisi Kesehatan Keuangan Daerah berdasarkan Skor Indeks, 2016-2019

Daerah	Kategori 2016	Kategori 2017	Kategori 2018	Kategori 2019
Kab. Lebak	Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Rendah
Kab. Pandeglang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Kab. Serang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang
Kab. Tangerang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kota Cilegon	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kota Tangerang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kota Serang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Kota Tangerang Selatan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: Hasil Analisis, diolah.

Secara umum, tidak ada daerah Kabupaten/Kota di Banten yang masuk pada kategori “sangat tinggi”. Namun, secara umum terjadi peningkatan pada 2018 dan 2019, seperti yang terjadi pada Kabupaten Lebak yang naik kategori menjadi “rendah” dari sebelumnya pada 2017 kategori “sangat rendah”. Kemudian, Kabupaten Serang meningkat menjadi “sedang” pada 2018-2019, dari sebelumnya kategori “rendah”.

Pada TA. 2016, sebanyak 1 daerah masuk kategori sangat rendah, 3 daerah masuk kategori rendah, dan 1 daerah masuk kategori sedang, serta 3 daerah masuk kategori tinggi. Sedangkan pada TA. 2017, sebanyak 2 daerah masuk kategori sangat rendah, 2 daerah masuk kategori rendah, dan 1 daerah masuk kategori sedang, serta 3 daerah masuk kategori tinggi. Sementara pada TA. 2018-2019 kategori sangat rendah 1 daerah, kategori rendah 2 daerah, kategori sedang 2 daerah dan kategori tinggi 3 daerah.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa secara umum skor indeks kesehatan keuangan daerah tertinggi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada periode 2016-2019 berkisar 0,724 – 0,791, sementara skor indeks terendah antara 0,124 – 0,159. Sedangkan rata-rata skor indeks berkisar antara 0,440 – 0,481. Semakin tinggi nilai skor indeks menunjukkan kondisi kesehatan keuangan daerah yang baik, sedangkan semakin rendah nilai skor indeks menunjukkan kondisi kesehatan keuangan daerah kurang baik. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.**

Hasil Perhitungan Rata-rata Skor Indeks Terendah dan Tertinggi, 2016-2019

Nilai	Rata-rata	Rata-rata	Rata-rata	Rata-rata	Rata-rata 2016- 2019
	Indeks Indikator 1-9 TA. 2016	Indeks Indikator 1-9 TA. 2017	Indeks Indikator 1-9 TA. 2018	Indeks Indikator 1-9 TA. 2019	
Terendah	0,159	0,133	0,137	0,124	0,138
Tertinggi	0,724	0,791	0,742	0,747	0,751
Rata-rata	0,443	0,440	0,478	0,481	0,460









































Sumber: Hasil Analisis, diolah.

Secara umum pada periode tahun anggaran 2016-2019, terdapat 5 (lima) daerah yang menunjukkan peningkatan skor indeks sedangkan 3 (tiga) daerah lainnya terjadi penurunan. Secara skor indeks, daerah yang mengalami peningkatan indeks kesehatan keuangan daerah adalah Kabupaten Serang

(0,162), Kabupaten Lebak (0,138), Kota Serang (0,084), Kota Tangerang Selatan (0,023) dan Kota Cilegon (0,003). Sementara daerah yang skornya menurun adalah Kota Tangerang (-0,009), Kabupaten Pandeglang (-0,035) dan Kabupaten Tangerang (-0,061). Secara peringkat indeks skor tertinggi adalah Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Pada 2016 skor tertinggi adalah Kota Tangerang Selatan (0,724), pada tahun 2017-2018 terjadi perubahan ranking, yang tertinggi adalah Kabupaten Tangerang (2017: 0,791) dan (2018: 0,742), pada tahun 2019 peringkat tertinggi adalah Kota Tangerang Selatan (0,747). Daerah Kabupaten/Kota yang tidak mengalami perubahan peringkat (ranking) skor indeks kesehatan keuangan daerah adalah Kota Tangerang (peringkat 3), Kota Cilegon (peringkat 4) dan Kabupaten Serang (peringkat 5). Sementara Kabupaten dengan rata-rata indeks terendah adalah Kabupaten Lebak (0,244) dan Pandeglang (0,147). Skor indeks pemeringkatan kesehatan keuangan daerah ini hanya diperbandingkan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten periode tahun anggaran 2016-2019. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel skor indeks dan peringkat berikut ini:

**Tabel 5.**

Perhitungan Skor Indeks Rata-rata Indikator berdasarkan Kabupaten/Kota, 2016-2019

Daerah	Rata-rata Indeks Indikator 1-9 TA. 2016	Rata-rata Indeks Indikator 1-9 TA. 2017	Rata-rata Indeks Indikator 1-9 TA. 2018	Rata-rata Indeks Indikator 1-9 TA. 2019	Peningkatan	RANK Indeks 2016	RANK Indeks 2017	RANK Indeks 2018	RANK Indeks 2019
Kab. Lebak	 0,216	 0,133	 0,273	 0,355		7	8	7	6
Kab. Pandeglang	 0,159	 0,167	 0,137	 0,124		8	7	8	8
Kab. Serang	 0,291	 0,295	 0,437	 0,453		5	5	5	5
Kab. Tangerang	 0,706	 0,791	 0,742	 0,645		2	1	1	2
Kota Cilegon	 0,552	 0,506	 0,551	 0,555		4	4	4	4
Kota Tangerang	 0,633	 0,643	 0,653	 0,623		3	3	3	3
Kota Serang	 0,262	 0,288	 0,299	 0,346		6	6	6	7
Kota Tangerang Selatan	 0,724	 0,697	 0,728	 0,747		1	2	2	1

Sumber: Hasil Analisis, diolah.

Pada tahun 2016, daerah yang tertinggi adalah Kota Tangerang Selatan dengan skor indeks (0,724) dan yang terendah adalah Kabupaten Pandeglang dengan skor indeks (0,159). Nilai rata-ratanya adalah 0,443. Terdapat 4 daerah yang berada di atas nilai rata-rata skor indeks, yaitu: Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Sementara 4 daerah lainnya berada di bawah rata-rata, yaitu:



Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang yang nilai skor indeksnya berada dibawah 0,300.

Pada tahun 2017, tidak banyak perubahan seperti tahun 2016, yang terjadi perubahan adalah terjadi penurunan skor pada Kota Tangerang Selatan, dari 0,724 menjadi 0,697, selain skor indeks yang menurun, peringkat Kota Tangerang Selatan juga turun dari peringkat 1 menjadi peringkat 2. Peringkat pertama diisi oleh Kabupaten Tangerang yang mengalami peningkatan skor sebesar 0,08 menjadi 0,791 pada tahun 2017. Hal yang sama terjadi pada Kabupaten Pandeglang, yang mengalami peningkatan skor sebesar 0,01 dan peringkat, dari peringkat 8 menjadi peringkat 7. Sebaliknya, Kabupaten Lebak mengalami penurunan indeks yang cukup tinggi. Skor indeks Kabupaten Lebak menurun sebesar -0,08 menjadi yang paling rendah yaitu 0,133, sedangkan secara peringkat menjadi peringkat terbawah.

Pada tahun 2018, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang menunjukkan peningkatan cukup signifikan sebesar 0,14, yang menyebabkan Kabupaten Lebak naik 1 peringkat menjadi peringkat 7, sementara Kabupaten Serang, meskipun secara skor indeks meningkat, namun peringkatnya tidak berubah masih pada peringkat 5. Skor tertinggi pada 2018 adalah Kabupaten Tangerang sebesar 0,742, secara skor turun dari tahun sebelumnya, meskipun menjadi yang tertinggi dan masih peringkat 1. Sementara skor yang paling rendah adalah Kabupaten Pandeglang yang menurun sebesar -0,031 menjadi 0,137, secara peringkat juga mengalami penurunan menjadi peringkat terakhir.

Pada tahun 2019, hasil analisis menunjukkan, terjadi peningkatan skor indeks dan peringkat pada Kota Tangerang Selatan menjadi yang tertinggi, dengan skor 0,747 dan menjadi peringkat 1 setelah 2 tahun sebelumnya berada pada peringkat 2. Skor indeks Kabupaten Tangerang menurun berturut-turut sejak 2017, dari 0,791 (2016) menjadi 0,742 (2018) dan menurun kembali menjadi 0,645 (2019), dan peringkatnya menurun menjadi peringkat 2. Selain itu, hal yang menarik adalah peningkatan skor dan peringkat Kabupaten Lebak yang cukup signifikan (peningkatan skor tertinggi pada 2019) dengan skor 0,355 dan menjadi peringkat 6, sementara Kota Serang meskipun terjadi peningkatan skor indeks, namun secara peringkat tergantikan oleh Kabupaten Lebak, yang menjadikan peringkatnya menurun menjadi peringkat 7. Sedangkan Kabupaten Pandeglang mengalami penurunan skor menjadi 0,124 dan bertahan pada peringkat 8 atau peringkat terakhir.

## SIMPULAN

Secara umum, kondisi kesehatan keuangan daerah sebagian besar terlihat pada Pemerintahan Kota dan Kabupaten Tangerang. Wilayah Selatan Banten seperti Kabupaten Lebak dan Pandeglang masih tertinggal, baik dari sisi pembangunan maupun kesehatan keuangan daerahnya. Hal ini dapat menjadi fokus perhatian bagi pemerintah provinsi untuk mengoptimalkan APBD untuk pembangunan. Hal tersebut terlihat pada skor indeks daerah yang berada di atas dan di bawah rata-rata Provinsi Banten. Berdasarkan analisis pengelompokan type pemerintahan Kota, hanya Kota Serang yang nilainya skornya masih dibawah rata-rata indeks. Sementara pada type pemerintahan Kabupaten, Kabupaten Tangerang merupakan perwakilan Kabupaten yang memiliki nilai skor indeks yang tinggi. Meskipun Kota Serang berada di bawah rata-rata, tetapi secara skor Kota Serang yang konsisten terus meningkat dan mengalami perbaikan. Secara umum, jika dibandingkan dengan indikator pembangunan daerah seperti angka kemiskinan dan indeks pembangunan manusia, terdapat pola relasi yang kuat antara indikator pembangunan dengan indikator kesehatan keuangan daerahnya.

Kesenjangan pembangunan dan rasio fiskal daerah di Provinsi Banten sangat terlihat. Penelitian berikutnya terutama untuk menguji kinerja keuangan Kota dapat membandingkan dengan Kota-kota lainnya yang dianggap lebih setara. Akan lebih baik, membandingkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan capaian keberhasilan pembangunan, baik IPM, angka kemiskinan maupun indikator keberlanjutan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten. *Daerah Dalam Angka Provinsi Banten 2020*. Banten: BPS, 2020. Diakses online melalui: <https://banten.bps.go.id/publication/2020/04/27/41c9192acf8b24ecbaa2d8e5/provinsi-banten-dalam-angka-2020.html>
- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Brown, KW., *The 10-Point Test of Financial Condition: Toward an Easy-to-Use Assessment Tool for Smaller Cities*. Government Finance Review. Volume 9 No.6 p 21-26. 1993. Diakses melalui:

<https://localgovernment.extension.wisc.edu/files/2016/04/kenneth-brown-Ten-point-test.pdf>

Digdowiseiso, Kumba., Djumadin, Zainul. *Fiscal Decentralization In District Of Karawang, Indonesia*. International Journal of Scientific and Technology Research (IJSTR). Vol 9, Issue 02, February, 2020. Diakses melalui: <http://repository.unas.ac.id/558/1/Fiscal-Decentralization-In-District-Of-Karawang-Indonesia%20%28Kumba%20dan%20Zainul%20Feb%202020%29.pdf>

Digdowiseiso, Kumba., Eko Sugiyanto, & Heri Dian Setiawan. *Fiscal decentralisation and inequality in indonesia*. *Ekonomika Regiona [Economy of Region]*, 16 (3), 989-1002. 2020. doi: <https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2020-3-24>.

Digdowiseiso, Kumba. *Sistem Keuangan Publik*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-Unas), 2015.

Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.

Iqbal, Muhammad., Mohammad Baga, Lukman., Budiman Hakim, Dedi. *Desain Formulasi Penilaian Kinerja Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat)*. *Jurnal BPPK Volume 10 Nomor 1, 2017*. p.11 – 23

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Analisis Realisasi APBD Tahun Anggaran 2012*. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2013.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Ringkasan Realisasi APBD TA. 2016-2019*. Jakarta, 2020. Diakses online melalui: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Bagaimana Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) Diimplementasikan Agar Meningkatkan Kualitas Anggaran Publik*. Jakarta, 2014. Artikel dapat diakses melalui <https://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/ppkbllu/id/data-publikasi/artikel/57-bagaimana-pendekatan-penganggaran-berbasis-kinerja-pbk-diimplementasikan-agar-meningkatkan-kualitas-anggaran-publik.html>

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002.

Masdiantini, P., dan Erawati, N. *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK pada Kinerja Keuangan*. E-Jurnal Akuntansi, 14 (2), 2016. p.1150-1182. Diakses online melalui: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/15041>

Natrini, ND., dan Ritonga, IT., *Design and Analysis of Financial Condition Local Government Java and Bali (2013-2014)*. SHS Web of Conference Volume 34, 2017. p 1-9

Nurcholis, Hanif. dkk. *Materi Pokok Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*; 1-9; IPEM4542/ Cet.3; Ed.3. Universitas Terbuka: Tangerang Selatan, 2016.

OECD. *Performance Budgeting: A Users' Guide*, 2008.

Sularso, Havid dan Yanuar E. Restianto. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Jawa Tengah*. Media Riset Akuntansi, Vol 1, No.2, Agustus 2011. p.109-124

## **Regulasi**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2015 tentang Pemingkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta (ID): Kemenkeu.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN :**

**Lampiran 1: Indikator dan Hasil Perhitungan Rasio dan Indeks**

**Indikator 1 : Rasio Pendapatan Daerah Per Kapita**

Daerah	1. Rasio Pendapatan Daerah thd Penduduk (Rupiah/ Kapita)				Indeks1- 2016	Indeks1- 2017	Indeks1- 2018	Indeks1- 2019
	2016	2017	2018	2019				
Kab. Lebak	1.965.986	1.892.355	1.944.280	2.065.752	0,29	0,23	0,26	0,27
Kab. Pandeglang	1.849.222	2.053.994	1.959.944	2.181.679	0,25	0,29	0,27	0,31
Kab. Serang	1.674.066	1.893.365	1.954.101	2.014.087	0,19	0,23	0,27	0,25
Kab. Tangerang	1.423.985	1.527.824	1.529.557	1.582.496	0,10	0,10	0,10	0,10
Kota Cilegon	3.927.566	4.081.246	3.834.413	4.096.824	1,00	1,00	1,00	1,00
Kota Tangerang	1.655.285	1.877.133	1.855.969	1.957.466	0,18	0,22	0,23	0,23
Kota Serang	1.760.351	1.879.904	1.863.843	1.980.310	0,22	0,22	0,23	0,24
Kota Tangerang Selatan	1.726.376	1.882.455	1.952.160	2.030.434	0,21	0,22	0,27	0,26

**Indikator 2 : Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah (%)**

Daerah	2. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) thd Pendapatan Daerah (%)				Indeks2- 2016	Indeks2- 2017	Indeks2- 2018	Indeks2- 2019
	2016	2017	2018	2019				
Kab. Lebak	12,2%	19,3%	13,9%	12,5%	0,17	0,18	0,21	0,19
Kab. Pandeglang	9,0%	15,7%	8,3%	8,3%	0,10	0,10	0,10	0,10
Kab. Serang	23,9%	29,0%	23,9%	23,3%	0,42	0,41	0,42	0,40
Kab. Tangerang	42,8%	52,4%	52,4%	48,1%	0,83	0,96	1,00	0,91
Kota Cilegon	35,1%	38,2%	35,5%	35,9%	0,67	0,63	0,65	0,66
Kota Tangerang	46,9%	50,7%	46,9%	47,4%	0,92	0,92	0,89	0,89
Kota Serang	11,2%	18,9%	13,2%	14,2%	0,15	0,17	0,20	0,22
Kota Tangerang Selatan	50,5%	54,1%	50,5%	52,8%	1,00	1,00	0,96	1,00

**Indikator 3 : Rasio Ruang Fiskal terhadap Pendapatan Daerah (%)**

Daerah	3. Rasio Ruang Fiskal thd Pendapatan Daerah (%)				Indeks3- 2016	Indeks3- 2017	Indeks3- 2018	Indeks3- 2019
	2016	2017	2018	2019				
Kab. Lebak	28,3%	35,6%	27,6%	25,8%	0,24	0,19	0,35	0,24
Kab. Pandeglang	22,5%	32,6%	14,0%	18,2%	0,10	0,10	0,10	0,10
Kab. Serang	36,4%	43,1%	35,4%	33,9%	0,44	0,40	0,50	0,38
Kab. Tangerang	53,7%	62,1%	62,1%	50,6%	0,86	0,95	1,00	0,68
Kota Cilegon	53,1%	58,7%	53,4%	50,3%	0,85	0,85	0,84	0,67
Kota Tangerang	53,0%	60,3%	54,6%	58,3%	0,84	0,90	0,86	0,82
Kota Serang	42,7%	48,1%	40,6%	41,6%	0,59	0,55	0,60	0,52
Kota Tangerang Selatan	59,4%	63,9%	54,5%	68,5%	1,00	1,00	0,86	1,00

**Indikator 4 : Rasio Pajak Daerah + Retribusi terhadap Pendapatan Daerah Regional Bruto (%)**

Daerah	4.Rasio Pajak Daerah Retribusi Daerah thd PDRB				Indeks4-	Indeks4-	Indeks4-	Indeks4-
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Kab. Lebak	0,4%	0,4%	0,4%	0,5%	0,10	0,10	0,17	0,19
Kab. Pandeglang	0,5%	0,4%	0,3%	0,3%	0,18	0,11	0,10	0,10
Kab. Serang	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,20	0,20	0,27	0,25
Kab. Tangerang	1,4%	1,8%	1,7%	1,7%	0,65	0,74	0,77	0,79
Kota Cilegon	0,5%	0,6%	0,5%	0,5%	0,19	0,19	0,21	0,22
Kota Tangerang	1,1%	1,2%	1,1%	1,1%	0,47	0,48	0,48	0,49
Kota Serang	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,15	0,17	0,22	0,23
Kota Tangerang Selatan	2,1%	2,3%	2,2%	2,2%	1,00	1,00	1,00	1,00



**Indikator 5 : Rasio Pajak Daerah + Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah Regional Bruto (%)**

Daerah	4. Rasio Pajak Daerah Retribusi Daerah thd PDRB				Indeks4-	Indeks4-	Indeks4-	Indeks4-
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Kab. Lebak	0,4%	0,4%	0,4%	0,5%	0,10	0,10	0,17	0,19
Kab. Pandeglang	0,5%	0,4%	0,3%	0,3%	0,18	0,11	0,10	0,10
Kab. Serang	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,20	0,20	0,27	0,25
Kab. Tangerang	1,4%	1,8%	1,7%	1,7%	0,65	0,74	0,77	0,79
Kota Cilegon	0,5%	0,6%	0,5%	0,5%	0,19	0,19	0,21	0,22
Kota Tangerang	1,1%	1,2%	1,1%	1,1%	0,47	0,48	0,48	0,49
Kota Serang	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,15	0,17	0,22	0,23
Kota Tangerang Selatan	2,1%	2,3%	2,2%	2,2%	1,00	1,00	1,00	1,00

**Indikator 6 : Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Daerah (%)**

Daerah	6. Rasio Belanja Modal thd Belanja Daerah (%)				Indeks6-	Indeks6-	Indeks6-	Indeks6-
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Kab. Lebak	22,2%	15,1%	12,8%	14,5%	0,40	0,10	0,10	0,12
Kab. Pandeglang	16,7%	21,3%	14,0%	13,9%	0,17	0,40	0,16	0,10
Kab. Serang	16,4%	16,9%	19,7%	18,8%	0,16	0,19	0,44	0,33
Kab. Tangerang	31,1%	30,7%	30,0%	23,3%	0,78	0,85	0,94	0,54
Kota Cilegon	28,6%	28,5%	19,2%	22,7%	0,67	0,74	0,41	0,51
Kota Tangerang	25,3%	26,0%	23,9%	20,1%	0,53	0,62	0,64	0,39
Kota Serang	15,0%	25,1%	16,6%	18,9%	0,10	0,58	0,29	0,33
Kota Tangerang Selatan	36,3%	34,0%	31,2%	33,2%	1,00	1,00	1,00	1,00

**Indikator 7 : Rasioa Belanja Pegawai BL+BTL terhadap Belanja Daerah (%)**

Daerah	7. Rasio Belanja Pegawai (BTL+BL) thd Belanja Daerah (%)				Indeks7- 2016	Indeks7- 2017	Indeks7- 2018	Indeks7- 2019
	2016	2017	2018	2019				
	Kab. Lebak	42,5%	39,3%	40,6%	39,2%	0,44	0,10	0,49
Kab. Pandeglang	49,3%	39,3%	51,5%	48,7%	0,10	0,10	0,10	0,10
Kab. Serang	43,5%	37,2%	35,8%	34,8%	0,39	0,24	0,66	0,66
Kab. Tangerang	29,0%	24,7%	23,5%	31,2%	1,00	1,00	1,00	0,70
Kota Cilegon	34,9%	32,0%	37,5%	37,4%	0,81	0,60	0,60	0,56
Kota Tangerang	38,3%	33,5%	32,9%	33,2%	0,64	0,50	0,76	0,72
Kota Serang	46,8%	35,6%	42,0%	41,4%	0,23	0,36	0,44	0,39
Kota Tangerang Selatan	33,4%	32,2%	36,6%	23,8%	0,89	0,59	0,63	1,00

**Indikator 8 : SiLPA TA. Sebelumnya terhadap Belanja Daerah (%)**

Daerah	8. Rasio SiLPA TA. Sebelumnya thd Belanja Daerah (%)				Indeks8-2016	Indeks8-2017	Indeks8-2018	Indeks8-2019
	2016	2017	2018	2019				
Kab. Lebak	10,8%	10,9%	6,5%	9,5%	0,10	0,10	0,10	0,65
Kab. Pandeglang	13,0%	11,1%	8,1%	3,6%	0,20	0,12	0,20	0,10
Kab. Serang	17,5%	13,2%	14,1%	10,1%	0,39	0,28	0,58	0,71
Kab. Tangerang	20,1%	17,7%	18,0%	13,2%	0,50	0,64	0,82	1,00
Kota Cilegon	19,3%	12,1%	10,0%	10,6%	0,47	0,20	0,32	0,75
Kota Tangerang	31,7%	22,2%	20,8%	12,8%	1,00	1,00	1,00	0,96
Kota Serang	16,2%	13,9%	7,0%	7,5%	0,33	0,34	0,13	0,47
Kota Tangerang Selatan	25,5%	17,2%	16,6%	12,7%	0,73	0,61	0,74	0,95

**Indikator 9 : Rasio SiLPA TA. Sebelumnya terhadap Belanja Daerah (%)**

Daerah	9. Rasio Pokok + Bunga Utang thd Pendapatan				Indeks9-2016	Indeks9-2017	Indeks9-2018	Indeks9-2019
	2016	2017	2018	2019				
Kab. Lebak	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10	0,10	0,10	0,10
Kab. Pandeglang	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10	0,10	0,10	0,10
Kab. Serang	0,00%	0,00%	0,00%	1,15%	0,10	0,10	0,10	1,00
Kab. Tangerang	0,01%	2,33%	0,00%	0,00%	1,00	1,00	0,10	0,10
Kota Cilegon	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10	0,10	0,10	0,10
Kota Tangerang	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,10	0,15	0,10	0,10
Kota Serang	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10	0,10	0,10	0,10
Kota Tangerang Selatan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10	0,10	0,10	0,10

## Lampiran 2 : Hasil Rata-rata Indeks dan Kategori Indeks

Daerah	Rata-rata Indeks1-9-2016	Rata-rata Indeks1-9-2017	Rata-rata Indeks1-9-2018	Rata-rata Indeks1-9-2019
Kab. Lebak	0,22	0,13	0,27	0,35
Kab. Pandeglang	0,16	0,17	0,14	0,12
Kab. Serang	0,29	0,29	0,44	0,45
Kab. Tangerang	0,71	0,79	0,74	0,64
Kota Cilegon	0,55	0,51	0,55	0,55
Kota Tangerang	0,63	0,64	0,65	0,62
Kota Serang	0,26	0,29	0,30	0,35
Kota Tangerang Selatan	0,72	0,70	0,73	0,75

Daerah	Kategori 2016	Kategori 2017	Kategori 2018	Kategori 2019
Kab. Lebak	Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Rendah
Kab. Pandeglang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Kab. Serang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang
Kab. Tangerang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kota Cilegon	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kota Tangerang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kota Serang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Kota Tangerang Selatan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi